

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan adalah suatu realitas yang dialami oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Keadaan kemiskinan muncul ketika individu, keluarga, atau komunitas tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (Pinontoan, 2020:1). Pendapat lain dikemukakan oleh Alba & Kurniawan (2019 :25) bahwa Kemiskinan adalah situasi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan standar hidup kelompok dan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan potensi mental dan fisiknya dalam lingkungan tersebut. Dalam komunitas yang sederhana, kemiskinan sering dikaitkan dengan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Definisi ini sesuai dengan pandangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal demi hidup layak. Ellis dalam (Pinontoan, 2020:7) mengemukakan bahwa kemiskinan memiliki dimensi yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan sosial-psikologis, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: Dari segi ekonomi, garis kemiskinan diukur dalam sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta berbagai barang dan jasa lainnya, setara dengan konsumsi makanan sejumlah 2100 kalori. Dari perspektif politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan. Konsep kekuasaan mencakup struktur politik yang menentukan kemampuan sekelompok orang dalam mengakses dan menggunakan sumber daya. Ada tiga pertanyaan pokok terkait akses ke kekuasaan,

yakni bagaimana seseorang dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat, bagaimana partisipasi dalam pengambilan keputusan terkait sumber daya, dan bagaimana kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Dari segi sosial-psikologis, kemiskinan merujuk pada kurangnya jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mengakses peluang peningkatan produktivitas. Dimensi ini juga mencakup hambatan-hambatan yang mencegah seseorang memanfaatkan peluang yang tersedia dalam masyarakat. Melalui pemahaman mendalam terhadap ketiga dimensi ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih holistik dan efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. (Alba & Kurniawan, 2019:15-16).

Ada lima jenis kemiskinan yang dapat dibedakan, meliputi kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, kemiskinan kronis, dan kemiskinan sementara. Pertama, kemiskinan absolut terjadi ketika tingkat pendapatan seseorang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Kemudian, kemiskinan relatif terjadi saat pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural terjadi ketika faktor budaya menjadi penyebabnya, seperti ketidakmauan untuk berusaha meningkatkan taraf hidup. Kemiskinan kronis mencakup kondisi sosial budaya yang tidak produktif, keterbatasan sumber daya, keterisolasian, rendahnya pendidikan dan kesehatan, keterbatasan lapangan kerja, dan ketidakberdayaan dalam mengikuti ekonomi pasar. Terakhir, kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang terjadi akibat perubahan siklus ekonomi dari normal menjadi krisis, seringkali bersifat musiman.

Melalui pemahaman mengenai jenis-jenis kemiskinan ini, diharapkan dapat merancang strategi yang lebih tepat untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dalam berbagai konteks (Pinontoan, 2020:26). Suharto dalam (Alba & Kurniawan, 2019:25-26) menjelaskan bahwa secara konseptual, kemiskinan dapat disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama, faktor individu, yang terkait dengan aspek patologis, kondisi fisik, dan psikologis dari individu yang mengalami kemiskinan. Kedua, faktor sosial, yang mencakup kondisi lingkungan sosial yang dapat menjebak seseorang dalam keadaan miskin. Ketiga, faktor kultural, yang melibatkan kondisi atau kualitas budaya yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kemiskinan. Keempat, faktor struktural, yang terkait dengan sistem yang dianggap tidak adil dan tidak sensitif, sehingga dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam kemiskinan. Terdapat empat tingkatan kemiskinan yang dapat diidentifikasi. Pertama, individu atau keluarga mengalami kemiskinan ketika kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan perumahan tidak dapat terpenuhi. Kedua, pada tingkatan kedua, meskipun kebutuhan dasar terpenuhi, namun kebutuhan sekunder masih tidak terpenuhi. Pada tingkatan ketiga, kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, tetapi kebutuhan tersier masih belum terpenuhi. Terakhir, pada tingkatan keempat, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sudah terpenuhi, namun keluarga tetap tidak mampu memberikan jaminan investasi keuangan bagi anak-anak mereka.

Data Badan Pusat Statistik (Komalasari, 2023:8) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumedang pada tahun 2022 mengalami penurunan signifikan dari 126.280 jiwa menjadi 120.100 jiwa, atau mengalami

penurunan sekitar 4,89 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diukur dengan menggunakan batas garis kemiskinan sebesar Rp371.870,00 sedangkan pada tahun sebelumnya batas tersebut sebesar Rp360.054,00. Di tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 120.100 jiwa menjadi 111.400 jiwa. Walaupun terjadi penurunan angka kemiskinan yang cukup signifikan, namun jumlah tersebut tidak dapat disepelekan, mengingat kondisi kemiskinan menyebabkan ketidakberfungsian sosial bagi penduduk miskin. Kondisi ketidakberfungsian sosial tersebut ditandai dengan beberapa ciri-ciri orang yang mengalami kemiskinan atau disebut juga fakir miskin, diantaranya aspek kemiskinan diantaranya 1) keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar konsumsi (pangan, sandang, dan papan), 2) kurangnya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi, 3) kekurangan jaminan untuk masa depan karena kurangnya investasi dalam pendidikan dan keluarga, 4) rentan terhadap guncangan, baik yang bersifat individual maupun kolektif, 5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam, 6) tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, 7) kekurangan akses ke lapangan kerja dan mata pencaharian sumber daya alam, 8) keterbatasan untuk berusaha karena cacat fisik atau mental, 9) tidak beruntung secara sosial, seperti anak terlantar, wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpinggirkan (Pinontoan, 2020:5). Dilihat dari kondisi masyarakat miskin yang mengakibatkan ketidakberfungsian sosial, maka diperlukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat dilakukan oleh berbagai sektor, salah satunya melalui sektor pemerintah. Dalam hal ini

pemerintah telah merancang dan mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebutuhan fakir miskin yang dalam hal ini disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pedoman Umum Program Sembako (2020:15) menjelaskan Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial. Pada Pedoman Umum Program Sembako (2020:19-20) dijelaskan tujuan dan manfaat Program Sembako. Tujuan Program Sembako adalah mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM, meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi, dan memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Manfaat Program Sembako adalah ketahanan pangan di tingkat KPM Program Sembako sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem; menggerakkan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan bahan pangan; dan pencegahan terjadinya *stunting* dengan pemenuhan gizi. Penerima Manfaat Program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan sesuai pagu program yang disediakan Pemerintah, selanjutnya disebut KPM Program Sembako, yang namanya termasuk di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) Program Sembako dan ditetapkan oleh Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian Sosial. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga dan/atau seseorang yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial.

Pada Pedoman Umum Program Sembako (2020:3), program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikembangkan menjadi Program Sembako untuk memperkuat perlindungan sosial dan meningkatkan efektivitas bantuan pangan. Dalam program ini, indeks bantuan naik dari Rp110.000,00 menjadi Rp150.000,00/KPM per bulan, dan jenis komoditas yang dapat dibeli diperluas, tidak hanya beras dan telur. Upaya ini bertujuan memberikan akses KPM terhadap bahan pokok dengan kandungan gizi lainnya dan mencegah *stunting*. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun yang sama memaksa pemerintah mengambil langkah-langkah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Program Sembako menjadi instrumen Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk membantu kelompok usaha kecil dan penduduk terdampak COVID-19. Indeks bantuan program Sembako kembali dinaikkan menjadi Rp200.000,00/KPM/bulan, dan jumlah penerima manfaat diperluas dari 15,6 juta KPM menjadi 20 juta KPM untuk menjaga daya beli masyarakat selama masa tanggap darurat. Mulai Tahun 2022 Program Sembako disalurkan dalam bentuk tunai, KPM dapat langsung menarik uang pada Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di ATM Bank Himpunan Bank Nusantara (Himbara). Dilansir dari (Kompas, 2022) Menteri Sosial, Tri Rismaharini, mengungkapkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyalurkan Program Sembako dilakukan secara tunai senilai Rp200.000,00/bulan. Risma menegaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku, salah

satunya adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Pasal 5 ayat (1) dari Peraturan Presiden tersebut memberikan opsi penyaluran dengan cara penarikan uang dan/atau pembelian barang. Menteri Sosial menyoroti bahwa setelah uang masuk ke rekening, penerima manfaat memiliki kebebasan untuk mengatur penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Penelitian terdahulu memberikan pandangan yang signifikan terkait pengaruh Program Sembako terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat. Dalam penelitian oleh Coleman-Jensen, dkk. (2021:1), fokus pada Program Bantuan Makanan Tambahan (*Food Stamp Program*) di Amerika Serikat. Temuan menunjukkan bahwa partisipasi rumah tangga dalam program *Food Stamp Program* (FSP) sangat sensitif terhadap perubahan besaran manfaat, dengan dampak yang lebih besar daripada perubahan tingkat pengangguran atau penghasilan non-tenaga kerja. Analisis juga menunjukkan adanya hubungan negatif antara partisipasi tenaga kerja dan partisipasi dalam program FSP, serta status ketidakamanan pangan. Simulasi mengungkapkan bahwa peningkatan manfaat dari program FSP dapat meningkatkan partisipasi program dan menurunkan tingkat ketidakamanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Novalianita & Handayani (2023:40) mengenai Program Sembako dan prevalensi *stunting* di Indonesia, hasil *first stage* IV2SLS menunjukkan hubungan positif signifikan antara program sembako dengan asupan gizi yang memadai. Hasil *second stage* menegaskan bahwa tingkat kecukupan asupan makanan bergizi dapat menurunkan prevalensi *stunting*. Program Sembako diharapkan dapat mengurangi

beban pengeluaran keluarga miskin terkait makanan, dan pengembangan jenis bahan pangan dari program ini diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan merinci temuan-temuan tersebut, dapat diartikan bahwa Program Sembako memiliki dampak nyata terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat, baik dalam hal keamanan pangan, pola belanja, maupun asupan gizi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Program Sembako berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan keluarga penerima manfaat di Desa Malaka.

Barrientos dalam (Favourita et al., 2023:159) menjelaskan bahwa bantuan sosial adalah instrumen kebijakan utama pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, serta membangun dan melindungi individu, keluarga dan komunitas yang paling rentan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Program Bantuan Sosial adalah bantuan yang diberikan kepada individu, kelompok atau komunitas yang secara ekonomi, lemah dan kelayakan untuk menerimanya diuji terlebih dahulu dengan tes kemiskinan. Program Bantuan Sosial ini dapat bersifat sementara atau bersifat tetap, dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang atau melalui transfer, sifat bantuan biasa diberikan dengan syarat ataupun tanpa syarat (Alba & Kurniawan, 2019:36). Barrientos dalam (Favourita et al., 2023:163) mengemukakan komponen yang diperlukan dalam bantuan sosial adalah 1) *Program Objectives* yaitu menentukan tujuan dari program bantuan sosial; 2) *Beneficiary Selection* yaitu penentuan penerima manfaat; 3) *Transfer Modalities* yaitu skema transfer bantuan langsung tunai; 4) *Co-responsibility and Conditions* yaitu penanggung jawab program dari

level atas sampai terbawah serta kondisi program yang diberikan; dan 5) *Duration and Exit* yaitu berapa lama pemberian program dan strategi pengakhiran program. Gilbert dan Specht dalam (Sukoco, 2021:43) menyatakan bahwa kebutuhan manusia menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian yaitu kebutuhan fisik (*physical needs*), kebutuhan emosional (*emotional needs*), kebutuhan intelektual (*intellectual needs*), kebutuhan spiritual (*spiritual needs*), dan kebutuhan sosial (*social needs*).

Gilbert dan Specht dalam (Sukoco, 2021:43) menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu: 1) Kebutuhan fisik (*physical needs*), Hepworth dan Larsen dalam (Sukoco, 2021:48) menyebutkan bahwa kebutuhan fisik terdiri dari makanan (*food*), pakaian (*clothing*), perumahan (*housing*), pemeliharaan kesehatan (*health care*), keamanan (*safety*), dan perlindungan (*protection*); 2) Kebutuhan emosional (*emotional needs*), Hepworth dan Larsen dalam (Sukoco, 2021:48) menyebutkan bahwa kebutuhan emosional terdiri dari perasaan dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain (*feeling needed and valued by others*), rasa memiliki (*sense of belonging*), persahabatan (*companionship*). 3) Kebutuhan intelektual (*intellectual needs*), kebutuhan ini berfokus pada kebutuhan pendidikan anak, Meyer dalam (Sukoco, 2021:49) menjelaskan bahwa tahap perkembangan manusia pada tahap *preschool* memiliki kebutuhan akan belajar, sosialisasi, dan bermain; 4) Kebutuhan spiritual (*spiritual needs*), Zastrow dalam bukunya (2017:96) menyebutkan bahwa “*Key component of spirituality are the personal search for meaning in life, a senses of identity, and value system.*” Komponen kunci dari spiritualitas adalah pencarian pribadi akan

makna hidup, rasa identitas, dan sistem nilai; 5) Kebutuhan sosial (*social needs*), Maslow dalam (Sukoco, 2021:44) menyebutkan bahwa kebutuhan sosial terdiri dari kebutuhan akan rasa memiliki, kebutuhan untuk berkeluarga, berteman, dan berafiliasi.

Data KPM Program Sembako tahun 2023 di Desa Malaka berjumlah 226 KPM, data tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Desa Malaka masih tinggi, hal tersebut terjadi dikarenakan masih banyak masyarakat dari Desa Malaka yang masih belum mempunyai penghasilan tetap. Pada tanggal 6 Februari 2024, peneliti melakukan peninjauan ke lokasi penelitian untuk mendalami fenomena terkait penyaluran Program Sembako di Desa Malaka. Melalui wawancara singkat kepada 5 orang Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako, peneliti mengajukan dua pertanyaan terkait tujuan awal dari Program Sembako. Pertanyaan pertama menanyakan apakah bantuan senilai Rp200.000,00/bulan dapat mengurangi kebutuhan pangan keluarga setiap bulannya. Kelima KPM secara kompak menyatakan bahwa Program Sembako sangat membantu dalam mengurangi pengeluaran kebutuhan pangan setiap bulannya. Pertanyaan kedua menanyakan apakah dana Program Sembako cukup untuk membeli bahan pangan dengan gizi seimbang, dan kelima KPM mengungkapkan bahwa dana tersebut kurang mencukupi. Hasil peninjauan tersebut memunculkan isu permasalahan terkait Program Sembako di Desa Malaka. Program ini memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pengeluaran kebutuhan fisik, namun ditemukan bahwa dana senilai Rp200.000,00/bulan tidak mencukupi untuk membeli bahan pangan dengan gizi seimbang. Isu kekurangan dalam pemenuhan aspek kebutuhan fisik

muncul sebagai dampak dari Program Sembako. Hal ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara dukungan finansial yang diberikan dan kebutuhan KPM. Sebagai konsekuensi, penelitian ini akan lebih lanjut menggali dampak lebih mendalam dan implikasi dari isu ini terhadap pemenuhan kebutuhan KPM Program Sembako di Desa Malaka di Desa Malaka.

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang signifikan di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan banyaknya masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, penelitian ini berfokus pada upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ini melalui Program Sembako. Program Sembako merupakan salah satu program bantuan sosial utama dari pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Evaluasi dampak dari program ini penting untuk menilai efektivitas dan efisiensinya, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menyoroti bagaimana Program Sembako membantu KPM dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Alasan peneliti memilih Desa Malaka sebagai lokasi penelitian karena desa ini menjadi representasi kecil dari realitas kemiskinan di Indonesia dan peneliti mempunyai akses ke Desa Malaka. Desa Malaka merupakan gambaran yang mewakili kompleksitas tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Keberadaan Program Sembako di Desa Malaka memberikan kesempatan unik untuk mengeksplorasi dampak program tersebut pada pemenuhan kebutuhan KPM. Selain itu, Desa Malaka memiliki karakteristik yang mencerminkan kondisi kehidupan masyarakat yang bergantung pada sektor

pertanian dan memiliki tingkat ekonomi yang relatif rendah. Dengan mengkaji isu permasalahan terkait Program Sembako di Desa Malaka, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh Program Sembako dalam memenuhi kebutuhan KPM.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh antara Program Sembako terhadap pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?”. Adapun sub-sub rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Sembako di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana besarnya pengaruh Program Sembako terhadap pemenuhan Kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang?

1.3. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara Program Sembako terhadap pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Malaka, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengetahui antara Program Sembako dengan pemenuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di samping tujuan utama tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan Program Sembako di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;
2. Mengetahui pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Sembako di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang;
3. Mengetahu hasil uji hipotesis besarnya pengaruh Program Sembako terhadap pemenuhan kebutuhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Malaka Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian terdiri dari Manfaat Teoritis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu Praktik Pekerjaan Sosial, dan Manfaat Praktis yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan atau dasar pengambilan keputusan untuk menentukan program/kebijakan.

1.5.1. Manfaat Teoritis

Berikut manfaat teoritis dari penelitian ini:

1. Pengembangan ilmu pekerjaan sosial, menyumbangkan pemahaman lebih mendalam tentang pengaruh program bantuan sosial dalam konteks kebutuhan, berkontribusi pada perkembangan ilmu pekerjaan sosial;
2. Kontribusi terhadap teori dan konsep, memberikan dasar untuk pengembangan teori dan konsep dalam bidang pekerjaan sosial, terutama terkait perlindungan sosial melalui bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2. Manfaat Praktis

Berikut manfaat praktis dari penelitian ini:

1. Perkembangan Program Sembako, menyediakan wawasan untuk evaluasi dan perbaikan Program Sembako, membantu penyusun dan pelaksana program agar lebih efektif dalam pemenuhan kebutuhan KPM di Desa Malaka.
2. Peningkatan desain program bantuan sosial, memungkinkan perbaikan dalam desain program bantuan sosial, membantu pihak terkait mengoptimalkan manfaat yang diberikan kepada KPM.
3. Kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pandangan berharga untuk upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks kebutuhan KPM di Desa Malaka.

1.6. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah penelitian, hipotesis penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang konteks penelitian dan memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan. Selain itu, pendahuluan juga menjelaskan struktur penulisan yang diikuti dalam laporan penelitian.

Bab II Kajian Konseptual, bagian kajian konseptual memuat tentang penelitian terdahulu, konsep yang relevan, dan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat tentang desain penelitian, sumber data, definisi operasional, populasi dan sampel, uji validitas dan reliabilitas,

skala, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, bagian hasil penelitian memuat tentang gambaran lokasi penelitian, rekap data hasil pengumpulan data penelitian yang disajikan berupa grafik, tabel, dan gambar, serta pengujian hipotesis penelitian. Bagian pembahasan mengupas dan mengkaji hasil penelitian dan dikaitkan dengan masalah penelitian dan teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab V Usulan Program, bab ini memuat usulan program pemecahan masalah atau program pemecahan masalah yang ditawarkan oleh peneliti.

Bab VI Simpulan dan Saran, bab ini memuat simpulan dan saran, bagian saran berisikan dengan perumusan masalah atau tujuan penelitian, simpulan merupakan jawaban terhadap tujuan penelitian. Bagian saran berisikan implikasi dari simpulan atau juga dari temuan yang harus ditindaklanjuti baik untuk pemecahan masalah dari penelitian atau saran untuk penelitian lanjutan.